

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia..

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

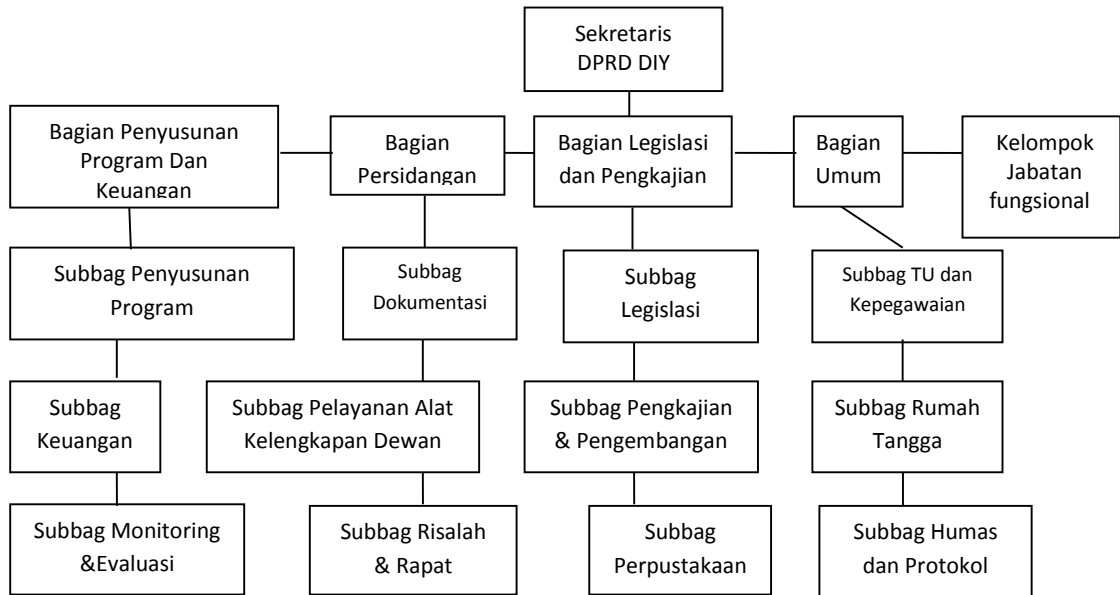
Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 ini diharapkan dapat:

1. Mendorong Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang berdasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.
3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

I.1. Struktur Organisasi

Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta



Adapun penjelasan dari gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Bagian dan Subbagian, terdiri dari :
 - a. Bagian Umum, terdiri dari 3 Sub Bagian yaitu :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga
 - 3) Sub Bagian Humas dan Protokol
 - b. Bagian Legislasi dan Pengkajian, terdiri dari 3 Sub Bagian yaitu :
 - 1) Sub Bagian Legislasi.
 - 2) Sub Bagian Pengkajian dan Pengembangan
 - 3) Sub Bagian Perpustakaan, Data dan Teknologi Informasi
 - c. Bagian Persidangan, terdiri dari 3 Sub Bagian yaitu :
 - 1) Sub Bagian Risalah dan Rapat
 - 2) Sub Bagian Pelayanan Alat Kelengkapan Dewan
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi
 - d. Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, terdiri dari 3 subbagian
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi

I.2. Fungsi dan Tugas

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 menetapkan bahwa Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan
3. Penyelenggaraan rapat-rapat
4. Penyiapan serta pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5. Penyelenggaraan persidangan dan penyiapan bahan risalah rapat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah
6. Penyiapan bahan pertimbangan teknis kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai kebijakan alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
7. Pelaksanaan legislasi dan pengkajian informasi
8. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan hubungan masyarakat
9. Pengaturan keamanan dan ketertiban di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya

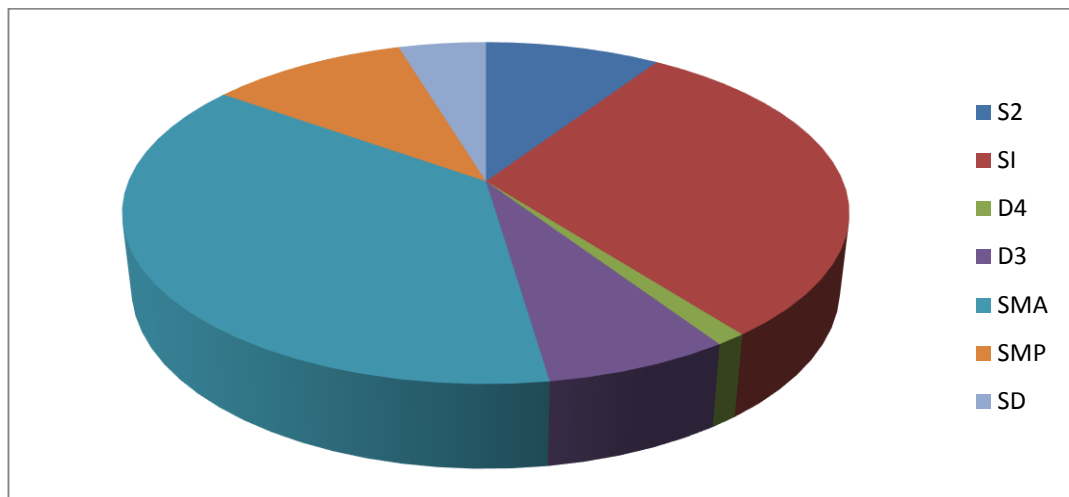
I.3. Keadaan Pegawai

Sumber daya manusia Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta diuraikan berdasarkan tingkat pendidikan, jabatan struktural dan jabatan fungsional, Golongan, serta jenis kelamin dengan rincian sebagai berikut :

Data Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S 2	8
2	S1	24
3	D IV	2
4	D III	7
5	SLTA	32
6	SLTP	9
7	SD	4
Jumlah		86

Gambar 2 Data Pegawai Sekretariat DPRD menurut Tingkat Pendidikan

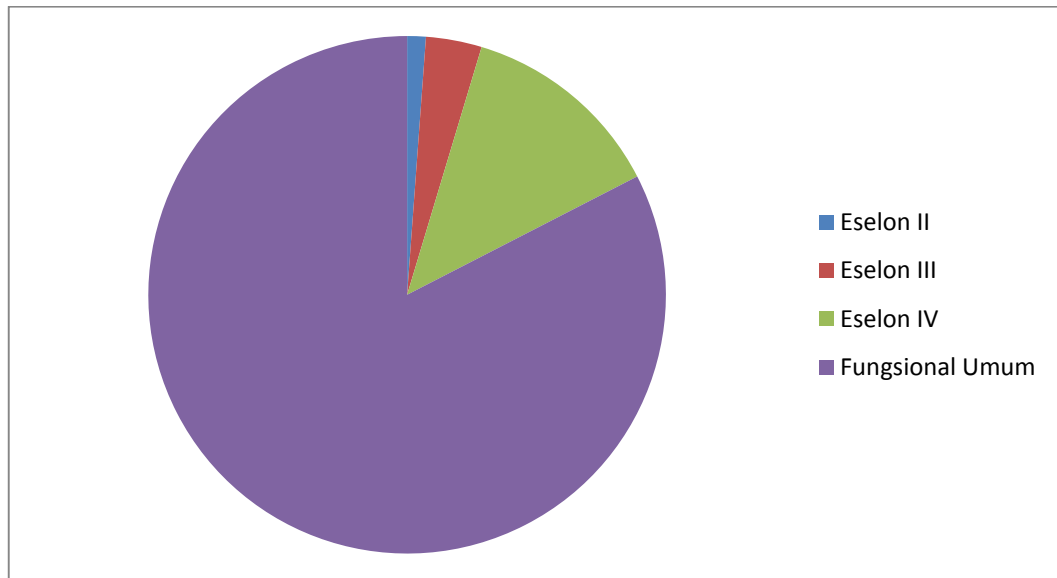


Sumber Data : Subbag TU dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014

Data pegawai berdasarkan jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	12
4	Fungsional Umum	69

Gambar 3. Data Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Jabatan



Sumber Data : Subbag TU dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014

Data pegawai berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki - laki	53
2	Perempuan	33

Gambar 4. Data Pegawai DPRD menurut Jenis Kelamin

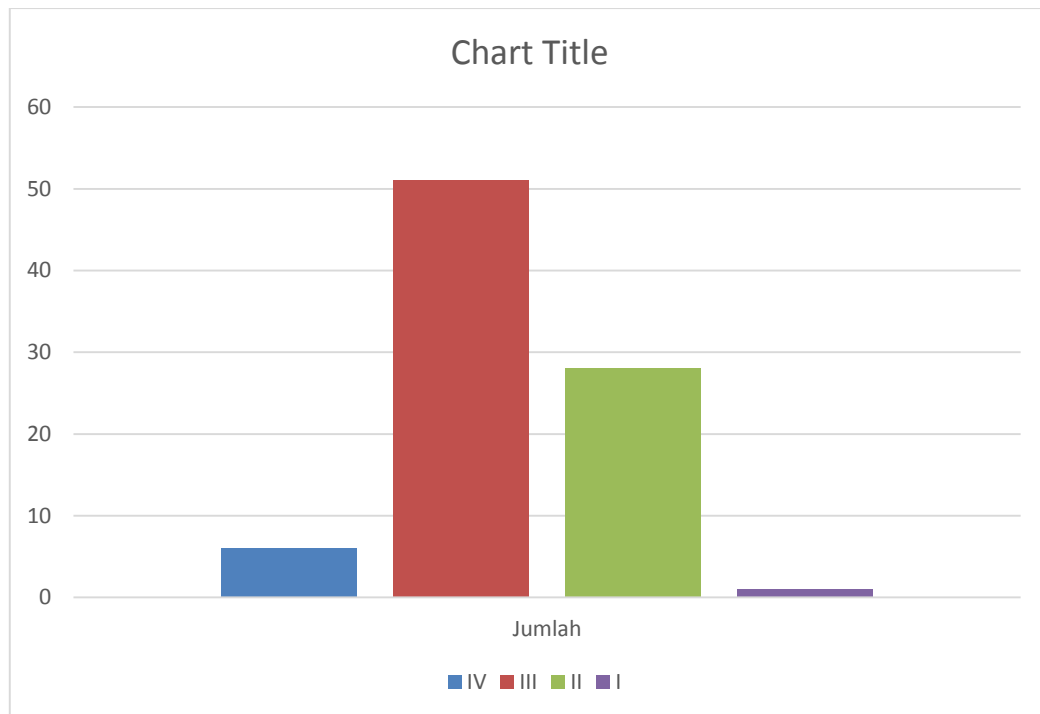


Sumber Data :Subbag TU dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014

Data pegawai berdasarkan golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	6
2	III	51
3	II	28
4	I	1

Gambar 5. Data Pegawai Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Golongan



Sumber Data : Subbag TU dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2008 jumlah ideal Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 117 personil, sedangkan hasil dari penyajian data diatas diperoleh jumlah PNS Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 86 personil, sehingga secara keseluruhan Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta masih mengalami kekurangan pegawai sebanyak 31 personil. Maka kekurangan pegawai

berdasarkan jabatan di lingkungan Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta

:

No	Jabatan	Jumlah Ideal	Jumlah Riil	Kekurangan
1.	Esselon II	1	1	-
2.	Esselon III	4	4	-
3.	Esselon IV	12	12	-
4.	Fungsional Umum	100	69	31
JUMLAH		117	86	31

Sumber :Subbagian TU danKepegawaian

I.4. Keadaan Sarana dan Prasarana.

Sarana dan prasarana yang ada di Sekretariat DPRD Daerah Istimewa

Yogyakarta adalah sarana dan prasarana kondisi awal Tahun 2014

No	Nama Sarana	Jumlah
1.	Alat-alat besar	2 buah
2.	Alat-alat angkutan	41 buah
3.	Alat-alat kantor dan rumah tangga	2.711buah
4.	Alat-alat studio dan komunikasi	250buah
5.	Bangunan gedung	8 buah
6.	Instalasi	2 buah
7.	Jaringan	4 buah
8.	Buku perpustakaan	5.438 buku
9.	Barang bercorak kesenian/kebudayaan	101 buah
10.	Hewan, ternak dan tanaman	1 buah

Sumber : Sub Bagian RumahTangga

Ketersediaan sarana dan prasarana komputer dan laptop banyak yang usianya sudah tua, sehingga perlu peremajaan.

I.5. Keuangan

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat DPRD DIY Tahun

2014 terdiri dari :

Anggaran Murni

Pendapatan	=	Rp.	-
Belanja Tidak Langsung	=	Rp.	4.973.905.543,00
Belanja Langsung	=	Rp.	45.712.422.905,00
Jumlah Anggaran	=	Rp.	50.686.328.448,00

Anggaran Setelah Perubahan

Pendapatan	=	Rp.	-
Belanja Tidak Langsung	=	Rp.	4.962.971.859,00
Belanja Langsung	=	Rp.	45.594.583.603,00
Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	=	Rp.	50.557.555.462,00

Realisasi Belanja

Belanja Tidak Langsung			
Anggaran	=	Rp.	4.962.971.859,00
Realisasi	=	Rp.	4.912.338.209,00
SisaAnggaran	=	Rp.	50.633.650,00

Belanja Langsung

Anggaran	=	Rp.	45.594.583.603,00
Realisasi	=	Rp.	33.224.148.025,00
SisaAnggaran	=	Rp.	12.370.435.578,00

I.6Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah:

BABI PENDAHULUAN

I.1 Struktur Organisasi

I.2 Fungsi dan Tugas

I.3 Keadaan Pegawai

I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana

I.5 Keuangan

I.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1 Perencanaan Strategis

II.1.1 Visi dan Misi

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

II.1.3 Strategi

II.1.3.1 Misi 1

II.1.3.2 Misi 2

II.1.3.3 Misi 3

II.1.3.4 Misi 4

II.1.4 Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)

II.2 Penetapan Kinerja Tahun 2014

II.3 Rencana Anggaran

II.3.1 Target Belanja Sekretariat DPRD Daerah Istimewa
Yogyakarta

II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

II.4 Instrumen Pendukung

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Capaian Kinerja Tahun 2014

III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

III.3. Akuntabilitas Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. Perencanaan Strategis

Secara umum perencanaan strategis mempunyai pengertian sebagai suatu proses yang berpotensi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 – 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kebijakan lembaga yang program dan kegiatannya selama 5 (lima) tahun telah ditetapkan guna mencapai tujuan lembaga yaitu meningkatkan penyelenggaraan fasilitasi profesional yang antisipatif. Visi, Misi, dan tujuan Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

II.1.1. Visi dan Misi

Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai Visi yaitu “ **Menjadi Institusi yang profesional, antisipatif dan responsif dalam mendukung serta memfasilitasi kinerja dan hasil kerja DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta** ”.

Pernyataan visi tersebut bermakna sebagai berikut:

1. Profesional adalah kemampuan khusus untuk tugas pelayanan/perbantuan bagi pegawai kesekretariatan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jalan meningkatkan kemandirian.
2. Antisipatif adalah tanggap terhadap sesuatu yang telah (akan) terjadi pada perkembangan pemerintahan dan politik di Indonesia umumnya dan Yogyakarta Khususnya.
3. Responsif adalah kesiapan, peka dan tanggap terhadap arus dinamika perubahan politik dan peraturan yang berlaku.
4. Fasilitasi adalah usaha perbantuan/dukungan kepada Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Masyarakat.
5. Kinerja adalah tolok ukur capaian tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan sesuai indikator, target dan sasaran yang telah ditetapkan.

6. Hasil Kerja adalah tolok ukur capaian tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan/dikerjakan sesuai indikator, target dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi SDM, sarana dan prasarana instansi serta peningkatan peran kehumasan dan protokoler bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Meningkatkan kualitas penyusunan program, keuangan serta monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, efisien serta akurat,
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian dan layanan informasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta peningkatan fungsi kepastakaan.
4. Mewujudkan kualitas Dokumen kegiatan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, kualitas rapat-rapat, persidangan dan kualitas risalah rapat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, serta mewujudkan peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

II.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Mengacu kepada visi yang telah ditetapkan maka tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah :

1. Mewujudkan kualitas dan kompetensi SDM sesuai jumlah dan kualifikasinya, mewujudkan sarana dan prasarana instansi sesuai kebutuhan serta kualitas fasilitasi kehumasan dan protokoler bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Sekretariat dan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Mewujudkan kualitas penyusunan program, keuangan serta monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, efisien dan akurat pada penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Sekretariat DPRD dan DPRD
3. Mendorong Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

4. Mewujudkan bahan penyusunan produk hokum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian, layanan informasi DPRD dalam mendorong terwujudnya Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD, serta meningkatkan fungsi kepustakaan
5. Mewujudkan kualitas dokumen kegiatan DPRD, kualitas persidangan dan kualitas risalah hasil rapat-rapat DPRD
6. Mewujudkan adanya Tenaga Ahli Fraksi, kelompok pakar serta narasumber dalam mendukung kinerja dan hasil kerja DPRD
7. Mewujudkan jejaring kerja antara DPRD, Partai Politik, Stakeholder, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Sasaran

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi awal (2012)	Target akhir 2017
1	Terfasilitasinya penyusunan raperda inisiatif & pembahasan peraturan daerah oleh DPRD	Prosentase prolegda yang terselesaikan	%	92,30	100
2.	Terfasilitasinya peningkatan wawasan DPRD DIY	Jumlah keikutsertaan Anggota DPRD dalam peningkatan	orang	220	220

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi awal (2012)	Target akhir 2017
		kemampuan & wawasan			
3.	Koordinasi dan komunikasi, delegasi dan konsultasi serta kunjungan kerja DPRD dalam rangka menghimpun bahan kebijakan DPRD DIY	Jumlah rekomendasi kunjungan kerja sebagai bahan kebijakan DPRD	buah	196	218
4.	Meningkatnya kualitas bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian, layanan informasi dalam meningkatkan kinerja	Prosentase kajian/makalah/research brief yang dimanfaatkan oleh DPRD untuk melaksanakan fungsi DPRD	%	100	100
5.	Meningkatnya kualitas dokumen kegiatan DPRD kualitas persidangan dan kualitas risalah	Prosentase kegiatan dan kebijakan DPRD yang terdokumentasikan	%	100	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi awal (2012)	Target akhir 2017
	hasil rapat-rapat DPRD				
6.	Terfasilitasinya hearing/dialog dan koordinasi dengan semua stakeholder kegiatan Reses dan terjalinnya kemitraan dengan media massa serta publikasi kegiatan DPRD	Jumlah aspirasi masyarakat yang diterima	kali	207	186
		Frekuensi sosialisasi kegiatan DPRD kepada masyarakat yang terlaksana	kali	160	78
7.	Tersedianya tenaga ahli/narasumber/kelompok pakar dan bahan raperda Inisiatif serta kajian kebijakan untuk	Prosentase rekomendasi / masukan tenaga ahli/pakar DPRD	%	100	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi awal (2012)	Target akhir 2017
	pembahasan Program Legislasi Daerah				

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

II.1.3 Strategi

II.1.3.1. Misi 1

Meningkatkan kompetensi SDM, sarana dan prasarana instansi serta peningkatan peran kehumasan dan protokoler bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan DPRD.

A. Strategi

1. Peningkatan Kinerja Organisasi Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta melalui peningkatan kuantitas dan kualitas SDM
2. Peningkatan analisa kebutuhan pegawai, serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan fasilitasi terhadap DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Penyusunan dan pembuatan uraian tugas masing-masing personil Setwan

B. Kebijakan

1. Melaksanakan validasi inventarisasi asset, SDM dan Sarana Prasara melalui master plan
2. Menyelenggarakan dan mengirimkan peserta pendidikan dan pelatihan pegawai

C. Program

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

D. Kegiatan

1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3. Pengadaan peralatan gedung kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
7. Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
8. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kesekretariatan

II.1.3.2. Misi 2

Meningkatkan kualitas penyusunan program, keuangan serta monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, efisien serta akurat,

A. Strategi

1. Pengembangan system dan prosedur pelayanan keuangan serta system dan prosedur pelayanan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Menata ulang petugas PPTK sesuai tugas, fungsi dan beban kerjanya

B. Kebijakan

Melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku dan berdasarkan ASB (SBK-SBU) dan SHBJ dengan mengembangkan kajian perencanaan, monitoring dan evaluasi

C. Program

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

D. Kegiatan

1. Penyusunan laporan kinerja SKPD
2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
3. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi

4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

II.1.3.3. Misi 3

Meningkatkan kuantitas dan kualitas bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian dan layanan informasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta peningkatan fungsi kepastakaan.

A. Strategi

1. Peningkatan mutu produk hukum, pengembangan kebijakan dan kajian kebijakan serta peningkatan mutu dan kualitas tenaga ahli/narasumber / kelompok pakar
2. Pengembangan kualitas informasi dan layanan publik beserta peningkatan sarana dan prasarana penunjang penyampaian informasi dalam rangka penyediaan informasi kegiatan kedewanan
3. Peningkatan mutu pelayanan kepastakaan dalam rangka pengembangan fungsi kepastakaan disamping perlunya meningkatkan sarana dan prasarana penunjangnya

B. Kebijakan

1. Melaksanakan fasilitasi produk hukum, pengembangan kebijakan dan kajian kebijakan serta peningkatan mutu dan kualitas tenaga ahli / narasumber / kelompok pakar
2. Meningkatkan ketersediaan layanan informasi dan Infrastruktur data base dengan meningkatkan peran serta admin dalam layanan informasi melalui IT.
3. Pengembangan fungsi kepastakaan, dengan memaksimalkan aset yang ada.

C. Program

1. Pelayanan Administarsi Perkantoran
2. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

D. Kegiatan

1. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan

2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
3. Layanan Informasi Pendukung Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Website
4. Fasilitasi Penyelenggaraan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
5. Penyusunan Info Kajian
6. Fasilitasi pembahasan Raperda dan Raperda Inisiatif, rancangan Nota Kesepakatan, rancangan Keputusan / Peraturan DPRD
7. Fasilitasi Tenaga Ahli untuk Fraksi dan Kelompok Pakar untuk Alat Kelengkapan Dewan
8. Penyusunan Prolegda DIY
9. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

II.1.3.4. Misi 4

Mewujudkan kualitas Dokumen kegiatan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, kualitas rapat-rapat, persidangan dan kualitas risalah rapat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, serta mewujudkan peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

A. Strategi

1. Peningkatan Peran Alat Kelengkapan Dewan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perumusan perencanaan dan Evaluasi kebijakan dan kualitas tenaga ahli / narasumber/kelompok pakar
2. Peningkatan kualitas koordinasi dengan anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta serta membuka jejaring kerja dengan perguruan tinggi, institusi pemerintah, mas media elektronika dan radio, televisi serta pengembangan system jaringan dan website. Peningkatan mutu keamanan kerja dan jaminan kesehatan bagi anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta

B. Kebijakan

1. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan DPRD dan stakeholder
2. Semua fasilitasi kegiatan alat kelengkapan dewan harus berdasarkan SOP atau Juklak dan Juknis
3. Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan rapat, pembuatan risalah dan mendokumentasi hasil kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD

C. Program

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

D. Kegiatan

1. Hearing/ Dialog / Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama
2. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi
3. Rapat-rapat paripurna
4. Kegiatan Reses
5. Koordinasi dan komunikasi pimpinan dewan dan sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6. Pembahasan LKPJ Gubernur DIY
7. Penyusunan dokumentasi kegiatan dan kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

II.1.4. Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terfasilitasinya penyusunan raperda inisiatif dan pembahasan peraturan daerah oleh DPRD	Prosentase prolegda yang terselesaikan	%	95
2	Terfasilitasinya peningkatan wawasan DPRD DIY	Jumlah keikutsertaan Anggota DPRD dalam peningkatan	orang	275

		kemampuan dan wawasan		
3	Koordinasi dan komunikasi, delegasi dan konsultasi serta kunjungan kerja DPRD dalam rangka menghimpun bahan kebijakan DPRD DIY	Jumlah rekomendasi kunjungan kerja sebagai bahan kebijakan DPRD	buah	243
4	Meningkatnya kualitas bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian, layanan informasi DPRD dalam meningkatkan kinerja	Prosentase kajian/makalah/research Brief yang dimanfaatkan oleh DPRD untuk melaksanakan fungsi DPRD	%	100
5	Meningkatnya kualitas dokumen kegiatan DPRD, kualitas persidangan dan kualitas risalah hasil rapat-rapat DPRD	Prosentase kegiatan dan kebijakan DPRD yang terdokumentasikan	%	100
6	Terfasilitasinya hearing/dialog dan koordinasi dengan semua stakeholder kegiatan Reses dan terjalinnya kemitraan dengan media	Jumlah aspirasi dari masyarakat yang diterima	kali	212
		Frekuensi Sosialisasi kegiatan DPRD kepada masyarakat yang terlaksana	kali	75

	massa serta publikasi kegiatan DPRD			
7	Tersedianya tenaga ahli/narasumber/keompok pakar dan bahan raperda inisiatif serta kajian kebijakan untuk pembahasan Program Legislasi Daerah	Prosentase rekomendasi / masukan tenaga ahli/pakar DPRD	%	100

II.2. Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja Tahun 2014

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan penetapan kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta pada tabel berikut merupakan PK tahun 2014:

Tabel II.2 Penetapan Kinerja Tahun 2014

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	7	8
1	Terfasilitasinya penyusunan Raperda Inisiatif dan Pembahasan Peraturan Daerah oleh DPRD	Prosentase prolegda yang terselesaikan		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	9.703.278.000
			93%	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	7.849.912.500
				Pembahasan LKPJ Gubernur DIY	527.921.000
				Fasilitasi Pembahasan Raperda Inisiatif, Rancangan Nota Kesepakatan dan Rakepwan	495.777.000
				Fasilitasi Penyusunan RKT DPRD DIY	399.612.000
				Penyusunan Prolegda DIY	101.479.500
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum DPRD	143.786.000
				Fasilitasi Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	184.790.000
2	Terfasilitasinya Peningkatan wawasan, DPRD DIY	Jumlah keikutsertaan Anggota DPRD dalam peningkatan	220 orang	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	3.182.905.000
				Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	3.182.905.000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	7	8
		kemampuan dan wawasan			
3	Koordinasi dan komunikasi, delegasi dan konsultasi serta kunjungan kerja DPRD dalam rangka menghimpun bahan kebijakan DPRD DIY	Jumlah Rekomendasi kunjungan kerja sebagai bahan kebijakan DPRD	246 buah	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	14.681.122.702
				Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	302.568.750
				Koordinasi dan Komunikasi Pimpinan dan Sekretaris DPRD	825.240.000
				Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD DIY keluar Daerah	13.257.049.952
				Fasilitasi Kegiatan Kaukus Parlemen Perempuan DPRD DIY	296.264.000
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	340.740.700
4	Meningkatnya kualitas bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian, layanan	Prosentase kajian/makalah/research brief yang dimanfaatkan oleh	100%	Fasilitas Penyelenggaraan Pengkajian dan Pengembangan Kajian Kebijakan	193.262.000
				Penyusunan Info Kajian	147.478.700

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	7	8
	informasi DPRD dalam meningkatkan kinerja DPRD	DPRD untuk melaksanakan fungsi DPRD		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1.260.334.500
5	Meningkatnya kualitas dokumen kegiatan DPRD kualitas persidangan dan kualitas risalah hasil rapat-rapat DPRD	Prosentase kegiatan dan kebijakan DPRD yang terdokumentasikan	100%	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan & Fraksi	909.108.000
				Rapat-rapat Paripurna	271.500.000
				Penyusunan Dokumentasi Kegiatan & Kebijakan DPRD	79.726.500
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1.815.985.000
6	Terfasilitasinya hearing/dialog dan koordinasi dengan semua stakeholder kegiatan Reses dan terjalannya kemitraan dengan media massa serta publikasi kegiatan DPRD	Jumlah Aspirasi dari Masyarakat yang diterima	212 kali	Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama	366.760.000
				Kegiatan Reses	1.449.225.000
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	2.396.012.500
		Frekuensi sosialisasi kegiatan DPRD kepada masyarakat	93 kali	Layanan informasi Pendukung kegiatan DPRD melalui Website	519.190.000
				Penerbitan Majalah Mimbar Legislatif, Pembuatan Booklet DPRD DIY	141.976.500
				Penyelenggaraan Publikasi Kegiatan DPRD	1.636.171.000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	7	8
				Penyusunan Laporan Kegiatan Tahunan DPRD	98.675.000
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	463.350.000
7	Tersedianya tenaga ahli/narasumber/ kelompok pakar, bahan raperda Inisiatif dan kajian kebijakan pembahasan Program Legislasi Daerah	Prosentase rekomendasi/ masukan Tenaga Ahli/ Pakar DPRD	100%	Fasilitasi Tenaga Ahli untuk Fraksi dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan Dewan	463.350.000
JUMLAH					33.843.728.402

Jumlah Anggaran Per Program :

1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rp 35.859.729.912,00
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.763.026.491,00
3	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Rp 5.976.270.700,00
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 532.616.000,00
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Rp 281.525.000,00
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<u>Rp 181.415.500,00</u>
	Total	Rp 45.594.583.603,00

II.3. Rencana Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2014 Sekretariat DPRD DIY melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.50.686.328.448,00. Melalui mekanisme perubahan APBD 2014 menjadi Rp.50.557.555.462,00 dengan rincian belanja tidak langsung Rp.4.962.971.859,00 dan belanja langsung Rp.45.594.583.603,00.

Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 38.136.350.934,00 atau (75,44%), dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp.4.912.202.909,00 atau (98,98%) sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp.33.224.148.025,00 (72,87%).

II.3.1. Target Belanja Sekretariat DPRD DIY

Tabel II.3.1 Target Belanja Sekretariat DPRD DIY

Uraian	Target	Prosentase
Belanja Tidak Langsung	Rp.4.962.971.859	9,82%
Belanja Langsung	Rp.45.594.583.603	90,18 %
Jumlah	Rp.50.557.555.462	100,00%

II.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2014 Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel II.3.2 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1.	Terfasilitasinya penyusunan Raperda Inisiatif dan Pembahasan Peraturan Daerah oleh DPRD	9.703.278.000	28,67	
2.	Terfasilitasinya Peningkatan	3.182.905.000	9,40	

No	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
	wawasan, DPRD DIY			
3.	Koordinasi dan komunikasi, delegasi dan konsultasi serta kunjungan kerja DPRD dalam rangka menghimpun bahan kebijakan DPRD DIY	14.681.122.702	43,37	
4.	Meningkatnya Kualitas bahan penyusunan produk hokum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian, layanan informasi DPRD dalam meningkatkan kinerja DPRD	340.740.700	1,00	
5.	Meningkatnya kualitas dokumen kegiatan DPRD, kualitas persidangan dan kualitas risalah hasil rapat-rapat DPRD	1.260.334.500	3,73	
6.	Terfasilitasinya hearing/dialog dan koordinasi dengan semua stakeholder kegiatan Reses dan terjalinnya kemitraan	4.211.997.500	12,44	

No	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
	dengan media massa serta publikasi kegiatan DPRD			
7.	Tersedianya tenaga ahli/narasumber/ kelompok pakar dan bahan raperda Inisiatif serta kajian kebijakan untuk pembahasan Program Legislasi Daerah	463.350.000	1,36	
Jumlah		33.843.728.402		

II.4. Instrumen Pendukung

Instrumen pendukung seperti sistem informasi , sistem pengumpulan data atau inovasi lain yang mendukung penerapan SAKIP di Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Adanya jaringan internet yang memadai.
2. Tersedianya laptop / komputer yang cukup.
3. Kemampuan SDM yang memadai.
4. Koordinasi yang baik antar PPTK.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Capaian Kinerja Tahun 2014

Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel III.1 Capaian Kinerja Tahun 2014

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi	Persentase	Kriteria dan Kode
1.	Terfasilitasinya penyusunan Raperda Inisiatif dan Pembahasan Peraturan Daerah oleh DPRD	1 Prosentase prolegda yang terselesaikan	%	93	88,9	95,59	Sangat Baik
2.	Terfasilitasinya Peningkatan wawasan, DPRD DIY	1 Jumlah keikutsertaan Anggota DPRD dalam peningkatan kemampuan dan wawasan	orang	220	143	65	Rendah
3.	Koordinasi dan komunikasi, delegasi dan konsultasi serta kunjungan kerja DPRD dalam rangka menghimpun bahan kebijakan DPRD DIY	1 Jumlah Rekomendasi kunjungan kerja sebagai bahan kebijakan DPRD	buah	246	117	47,56	Sangat Rendah
4.	Meningkatnya kualitas bahan penyusunan produk hokum, kajian kebijakan, pengembangan hasil	1 Prosentase kajian/makalah/research brief yang dimanfaatkan oleh	%	100	103,16	103,16	Sangat Baik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi	Persentase	Kriteria dan Kode
	penelitian, layanan informasi DPRD dalam meningkatkan kinerja DPRD	DPRD untuk melaksanakan fungsi DPRD					
5.	Meningkatnya kualitas dokumen kegiatan, persidangan dan kualitas risalah hasil rapat-rapat DPRD	1 Prosentase kegiatan dan kebijakan DPRD yang terdokumentasikan	%	100	105,81	105,81	Sangat Baik
6.	Tersedianya hearing/dialog dan koordinasi dengan semua stakeholder kegiatan Reses dan terjalannya kemitraan dengan media massa serta publikasi kegiatan DPRD	1 Jumlah Aspirasi dari Masyarakat yang diterima	kali	212	136	64,15	Rendah
		2 Frekuensi sosialisasi kegiatan DPRD kepada masyarakat	kali	72	72	100	Sangat Baik
7.	Tersedianya tenaga ahli/narasumber/ kelompok pakar dan bahan raperda Inisiatif serta kajian kebijakan untuk pembahasan Program Legislasi Daerah	1 Prosentase rekomendasi/ masukan Tenaga Ahli/ Pakar DPRD	%	100	87,62	87,62	Tinggi

Dari tabel di atas, terdapat 8 indikator yang terbagi ke dalam 7 sasaran strategis. Pada tahun 2014, 4 indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 50 % dari total indikator. Sementara itu, sebanyak 4 indikator atau sebesar 50 % belum memenuhi target. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala. Capaian yang tertinggi pada indikator Meningkatnya kualitas dokumen kegiatan, persidangan dan kualitas risalah hasil rapat-rapat DPRD dengan persentase 105,81, sementara indikator yang mengalami capaian yang rendah adalah indikator jumlah rekomendasi kunjungan kerja sebagai bahan kebijakan DPRD

III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

III.2.1. Sasaran pertama adalah terfasilitasinya penyusunan raperda inisiatif dan pembahasan peraturan daerah oleh DPRD

Tabel III.2.1 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran pertama

No	Indikator	Capaian 2013	2014			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
			Target PK	Realisasi	% Realisasi		
1.	Prosentase Prolegda yang terselesaikan	99,16 %	93 %	88,90 %	99,59	100 %	88,90

Tolok ukur capaian sasaran terfasilitasinya penyusunan raperda inisiatif dan pembahasan peraturan daerah oleh DPRD DIY terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu indikator prosentase prolegda yang terselesaikan tahun 2014 dengan target sebesar 93 % dan tingkat capaian kinerja sebesar 88,90 %.

Dalam dokumen rencana jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis prosentase prolegda yang terselesaikan ditargetkan pada tahun ke dua sebesar 93, sedangkan capaian tahun 2014 adalah 88,90 atau sebesar 99,59%. Target akhir Rencana strategis Tahun 2017 sebesar 100 %. Capaian Akhir tahun 2014 terhadap Capaian akhir RPJMD Tahun 2017 prosentase prolegda yang terselesaikan sebesar 88,90 %. Terhadap gap akhir periode Renstra Sekretariat DPRD DIY merasa cukup yakin akan mampu mencapai target yang diharapkan.

Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013 sebesar 99,16 %, maka untuk tahun 2014 capaian kinerja sebesar 88,90 % mengalami penurunan dan dapat dikategorikan kriteria tinggi.

Capaian sasaran terfasilitasinya penyusunan raperda inisiatif dan pembahasan peraturan daerah oleh DPRD tahun 2014 sebesar 99,59 % dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 6.728.774.294 atau 65,35 % dari (pagu anggaran Rp. 9.703.278.000) kondisi ini dikatakan efisien.

Kondisi ini mampu mewujudkan produk hukum yang dihasilkan berupa 3 peraturan DPRD, 66 Keputusan Pimpinan DPRD dan persetujuan bersama serta 103 Keputusan DPRD DIY tahun 2014 yang ditargetkan 163 keputusan/peraturan terealisasi 172 keputusan/peraturan.

Permasalahannya adalah sebagian agenda DPRD tidak direalisasikan karena dampak dari dinamika yang terjadi pada awal pembentukan alat kelengkapan DPRD periode 2014-2019. Salah satunya adalah kegiatan pansus tahun 2014 ada sejumlah 3 pansus yang belum menghasilkan keputusan. Tiga pansus yang belum selesai tersebut diagendakan pada tahun 2015 menjadi muatan tambahan dalam pansus BA 2,3,4 dan 5 tahun 2015

Solusi dari permasalahan tersebut adalah menyusun agenda kerja yang lebih cermat dan menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan.

III.2.2. Sasarankedua adalah terfasilitasinya peningkatan wawasan DPRD DIY

Tabel III.2.2 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kedua

No	Indikator	Capaian 2013	2014			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2014 terhadap 2017
			Target PK	Realisasi	% Realisasi		
1.	Jumlah keikutsertaan Anggota DPRD dalam peningkatan kemampuan & wawasan	164,54 %	220 orang	143 orang	65	220 orang	65 %

Tolok ukur capaian sasaran terfasilitasinya peningkatan wawasan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 1 Indikator yaitu jumlah keikutsertaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam peningkatan kemampuan dan wawasan. Jumlah keikutsertaan Anggota DPRD dalam peningkatan kemampuan dan wawasan pada tahun 2014 sebesar 143 Orang anggota atau sebesar 65 %.

Dalam dokumen rencana jangka menengah yang terdapat dalam Rencana strategis dengan sasaran terfasilitasinya peningkatan wawasan DPRD DIY dengan indikator jumlah keikutsertaan anggota DPRD dalam peningkatan kemampuan dan wawasan pada tahun 2014 sebesar 220 orang. Capaian tahun 2014 sebesar 143 orang. Terhadap capaian akhir RPJMD Tahun 2017 sebesar 65%

Dibandingkan capaian tahun 2013 jumlah keikutsertaan Anggota DPRD dalam peningkatan kemampuan dan wawasan sebesar 164,54 %. Di tahun 2014 mengalami penurunan 99,54 %

Capaian sasaran Jumlah keikutsertaan Anggota DPRD dalam peningkatan kemampuan & wawasan tahun 2014 sebesar 65 % dengan penggunaan anggaran sebesar Rp.1.585.864.940 atau 48,31 % dari pagu anggaran (Rp.3.282.905.000) kondisi ini dikatakan tidak efisien.

Kondisi ini mengakibatkan peningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi pimpinan dan anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya menjadi tidak maksimal.

Permasalahannya adalah adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat dengan keluarnya SE Mendagri Nomor900/6975/SJ tanggal 28 November 2014, tentang penghematan orientasi dan pendalaman tugas yang mengatakan bahwa orientasi pendalaman tugas dilaksanakan di provinsi masing masing kecuali belum ada perguruan tinggi yang memenuhi syarat, sehingga peningkatan wawasan bagi anggota DPRD yang terakhir tidak dilaksanakan.

Solusinya adalah menjalin komunikasi dengan pimpinan dan anggota DPRD dalam mengikuti bimbingan teknis serta dalam menindaklanjuti Surat Edaran dari pemerintah pusat tersebut.

III.2.3. Sasaran ketiga adalah koordinasi dan komunikasi, delegasi, dan konsultasi serta kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menghimpun bahan kebijakan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel III.2.3 Target dan Realisasi Kinerja Ketiga

No	Indikator	Capaian 2013 %	2014			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
			Target PK	Realisasi	% Realisasi		
1.	Jumlah Rekomendasi kunjungan kerja sebagai bahan kebijakan DPRD	59,64	246kali	117kali	47,56	218Kali	53,67

Tolok ukur sasaran koordinasi dan komunikasi, delegasi, dan konsultasi serta kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menghimpun bahan kebijakan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Jumlah rekomendasi kunjungan kerja sebagai bahan kebijakan DPRD.

Dalam dokumen rencana jangka menengah yang terdapat dalam Rencana strategis dengan sasaran koordinasi dan komunikasi, delegasi, dan konsultasi serta kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menghimpun bahan kebijakan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ditargetkan sebesar 246 kali, pada tahun 2014 tercapai sebesar 117 kali atau 47,56 %.

Terhadap target akhir Tahun 2017 capaian tahun 2014 sebesar 53,67 %, target belum dapat tercapai.

Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013 sebesar 59,64 %, maka capaian kinerja tahun 2014 sebesar 47,56 % hal tersebut mengalami penurunan 12,08 %. Capaian tersebut dapat dikategorikan dengan kriteria sangat rendah.

Capaian sasaran koordinasi dan komunikasi, delegasi, dan konsultasi serta kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menghimpun bahan kebijakan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 sebesar 47,56 % dengan penggunaan anggaran sebesar Rp.9.518.639.832 atau 64,84 % dari pagu anggaran (Rp.14.681.122.702) kondisi ini dikatakan tidak efisien.

Kondisi ini menyebabkan jumlah rekomendasi kunjungan kerja sebagai pengambilan kebijakan tidak tercapai sesuai yang direncanakan dan mengakibatkan fungsi pengawasan DPRD hasil peninjauan dalam daerah menjadi tidak maksimal, termasuk pelaksanaan fungsi pengawasan kebijakan daerah yang dilakukan pada kunjungan ke luar negeri.

Permasalahannya adalah Kunjungan Kerja Dalam Daerah dilaksanakan menyesuaikan agenda dewan, disamping Alat Kelengkapan Dewan periode 2014-2019 terlambat dibentuk (yaitu pada tanggal 17 Desember 2014), sedangkan Kunjungan kerja ke luarnegeri ditargetkan 12 paket hanya dilaksanakan sebanyak 6 paket. Hal ini disebabkan adanya masa transisi anggota DPRD periode 2009-2014 yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2014 dengan Anggota DPRD hasil pemilu periode 2014-2019. Terhadap target akhir tahun 2017, capaian tahun 2014 sebesar 53.67 % masih belum mencapai target. Solusinya adalah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan AKD dan pimpinan DPRD.

III.2.4. Sasaran keempat adalah meningkatnya kualitas bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian, layanan informasi DPRD dalam meningkatkan kinerja DPRD

Tabel III.2.4 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Keempat

No	Indikator	Capaian 2013	2014			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
			Target PK	Realisasi	% Realisasi		
1.	Prosentase kajian/makalah/research brief yang dimanfaatkan oleh DPRD untuk melaksanakan fungsi DPRD	100 %	100	103,16	103,16	100	103,16

Berdasarkan penetapan kinerja tahun 2014 target kajian/makalah/research brief yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melaksanakan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah 100%, Realisasi Tahun 2014 sebesar 103,16 %, jadi melebihi target sebesar 3,16 %.

Dalam Rencana Strategis sasaran prosentase kajian/makalah/research brief dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melaksanakan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar 100%. Capaian Tahun 2014 sebesar 103,16 %. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 100%, maka capaian tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 3,16 %.

Capaian sasaran meningkatnya kualitas bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian, layanan informasi DPRD dalam meningkatkan kinerja DPRD tahun 2014 sebesar 103,16 % dengan penggunaan anggaran sebesar Rp.324.286.050,00 atau 95,17 % dari (pagu anggaran Rp. 340.740.700,00) kondisi ini dikatakan efisien. Kondisi ini mengakibatkan penguatan referensi dewan dan peningkatan kapasitas dewan.

Permasalahannya tidak semua hasil kajian / makalah / reseach brief dimanfaatkan dewan karena adanya masa transisi pergantian dewan dan proses pembentukan alat kelengkapan dewan.

Solusinya hasil kajian / makalah / research brief tersebut akan dikelompokkan sesuai bidang komisi masing – masing dan disampaikan kepada dewan sebagai bahan referensi pada saat dibutuhkan.

III.2.5. Sasaran kelima adalah meningkatnya kualitas dokumen kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kualitas persidangan dan kualitas risalah hasil rapat-rapat terdiri dari 1 Indikator yaitu prosentase kegiatan dan kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdokumentasi.

Tabel III.2.5 Target dan Realisasi Kinerja Kelima

No	Indikator	Capaian 2013	2014			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
			Target PK	Realisasi	% Realisasi		
1.	Prosentase kegiatan dan kebijakan DPRD yang terdokumentasi	91,65 %	100 %	105,81 %	105,81	100 %	105,81

Berdasarkan penetapan kinerja tahun 2014, Prosentase kegiatan dan kebijakan DPRD yang terdokumentasikan ditargetkan 100 % dan yang terealisasi adalah sebesar 105,81 %.

Dalam Dokumen Rencana Jangka Menengah yang terdapat dalam Rencana strategis adalah sebesar 100 % sedangkan capaian kinerja pada tahun 2014 ini sebesar 105,81%, dibandingkan pada tahun 2013 capaian kinerja 91,65 %, terjadi peningkatan sebesar 14,16 %.

Capaian sasaran meningkatnya kualitas dokumen kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kualitas persidangan dan kualitas risalah hasil rapat-rapat tahun 2014 sebesar 105,81 % dengan penggunaan anggaran sebesar Rp.848.059.520,00 atau 67,28 % dari pagu anggaran (Rp. 1.260.334.500,00) kondisi ini dikatakan efisien.

Kondisi ini akan memudahkan para pemangku kepentingan dalam rangka memanfaatkan dokumen hasil kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan kewenangan masing-masing.

III.2.6. Sasaran keenam adalah terfasilitasinya hearing/dialog dankoordinasidengansemuastakeholder kegiatan Reses dan terjalannya kemitraan dengan media massa serta publikasi kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari 2 Indikator kinerja yaitu Jumlah aspirasi masyarakat yang diterima dan Frekuensi sosialisasi kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada masyarakat

Tabel III.2.6 Target dan Realisasi Kinerja Keenam

No	Indikator	Capaian 2013	2014			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
			Target PK	Realisasi	% Realisasi		
1.	Jumlah Aspirasi Masyarakat yang diterima	75,80 %	212kali	136 kali	64,15	186 kali	73,12
2.	Frekuensi sosialisasi kegiatan DPRD	75,64 %	72 kali	72 kali	100,00	78 kali	92,31
Jumlah Rata-rata		75,72 %	284 kali	208 kali	72,24	264 kali	78,79

III.2.6. 1. Berdasarkan penetapan kinerja tahun 2014 target indikator jumlah aspirasi dari masyarakat yang diterima sebesar 212 kali. Capaian realisasi tahun 2014 sebanyak 136 kali atau sebesar 64,15%.

Dalam dokumen rencana jangka menengah yang terdapat dalam Rencana strategis jumlah keikutsertaan anggota DPRD dalam peningkatan kemampuan ditargetkan sebesar 212 kali. Capaian Tahun 2014 sebesar 136 kali atau sebesar 64,15%.

Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013 sebesar 75,80% dengan jumlah aspirasi masyarakat pada tahun 2013 sebesar 141 kali atau 75,80%. Pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 5 kali atau 11,65%. Tahun 2014 belum bisa mencapai 100 %.

Tingkat penurunan ini disebabkan aspirasi masyarakat sangat tergantung dengan jumlah unjukrasa / aspirasi / audiensi yang masuk ke DPRD. Capaian kinerja tahun 2014 terhadap capaian RPJMD tahun 2017 sebesar 73,12 %.

III.2.6.2. Berdasarkan penetapan kinerja tahun 2014, target Indikator Kinerja Frekuensi sosialisasi kegiatan DPRD kepada masyarakat sebesar 72 kali, capaian kinerja tahun 2014 adalah sebesar 72 kali atau sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013 sebesar 59 kali atau 75,64 %, maka capaian kinerja pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 24,34 %.

Dalam dokumen rencana jangka menengah yang terdapat dalam Rencana strategis ditargetkan sebesar 72 kali, Capaian tahun 2014 sebesar 72 kali atau 100%. Capaian Tahun 2014 terhadap RPJMD tahun 2017 sebesar 92,31 % Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh DPRD .

Capaian sasaran terfasilitasinya hearing/dialog dan koordinasi dengan semua stakeholder kegiatan Reses dan terjalinnya kemitraan dengan media massa serta publikasi kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 rata rata sebesar 72,24% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp.3.381.568.790,00 atau 80,28 % dari pagu anggaran (Rp. 4.211.997.500,00) kondisi ini dikatakan efisien.

Kondisi ini mengakibatkan fungsi penjangkaran aspirasi yang dilaksanakan DPRD berjalan lancar sehingga DPRD mampu menjadi jembatan dalam menerima/menampung aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi tersebut dan merekomendasikan untuk ditindaklanjuti baik oleh DPRD maupun oleh instansi sesuai dengan permasalahan yang ada.

Permasalahannya adalah aspirasi masyarakat yang ditangani DPRD tergantung dari jumlah unjukrasa, audiensi serta tamu yang tidak bisa diprediksi, sehingga kegiatan ini sifatnya fasilitasi.

Solusinya meningkatkan sosialisasi dan kerjasama dengan stakeholder sehingga ada lebih banyak aspirasi masyarakat yang dapat disampaikan DPRD secara langsung maupun melalui media yang tersedia.

III.2.7. Sasaran ketujuh adalah Tersedianya tenaga ahli/narasumber/kelompok pakar dan bahan raperda inisiatif serta kajian kebijakan untuk pembahasan Program Legislasi Daerah terdiri dari 1 Indikator Kinerja yaitu Prosentase rekomendasi/masukan/tenaga ahli/pakar DPRD.

Tabel III.2 Target dan Realisasi Kinerja Ketujuh

No	Indikator	Capaian 2013	2014			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
			Target PK	Realisasi	% Realisasi		
1.	Prosentase rekomendasi/masukan Tenaga Ahli/Pakar DPRD	63,05 %	100 %	87,62 %	87,62	100 %	87,62

Berdasarkan penetapan kinerja tahun 2014, sebagaimana target dalam dokumen rencana jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis rekomendasi/masukan/tenaga ahli/pakar DPRD adalah 100%, dengan capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 87,62%.

Capaian tahun 2014 terhadap target RPJMD tahun 2017 sebesar 87,02%. Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013 sebesar 63,05%, maka capaian kinerja pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 24,57%. Belum bisa mencapai 100% dikarenakan karena Alat kelengkapan Dewan dalam menggunakan rekomendasi dari kelompok pakar menyesuaikan dengan kebutuhan.

Capaian sasaran tersedianya tenaga ahli / narasumber / kelompok pakar dan bahan raperda inisiatif serta kajian kebijakan untuk pembahasan Program Legislasi Daerah tahun 2014 rata rata sebesar 87,62 % dengan penggunaan anggaran sebesar Rp.386.075.750,00 atau 80,28 % dari pagu anggaran (Rp.463.350.000,00) kondisi ini dikatakan efisien. Kondisi ini mengakibatkan peningkatan kinerja alat kelengkapan dewan. Permasalahannya adalah alat kelengkapan dewan dalam menggunakan rekomendasi kelompok pakar menyesuaikan kebutuhan disamping adanya dinamika pembentukan alat kelengkapan dewan periode 2014-2019.

Solusinya adalah meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan alat kelengkapan dewan dan kelompok pakar yang bisa memberikan masukan/suport dalam pengambilan kebijakan.

No	Tujuan / Sasaran / Indikator	Capaian/Kondisi 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap 2017 (AKHIR RPJMD)(%)
			Targ et	Realisa si	% Realisas i		
1	Mendorong Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah						
1.1	<i>Terfasilitasinya penyusunan raperda inisiatif dan pembahasan peraturan daerah oleh DPRD</i>						
1.1.1	Prosentase prolegda yang terselesaikan	99,16	93	88,9	95.59	100	88.90
	Faktor Penghambat : - Terlambatnya pembentukan Alat Kelengkapan Dewan periode 2014-2019 . - 3 Pansus belum menghasilkan keputusan - Tidak semua Alat Kelengkapan Dewan mengajukan Raperda Inisiatif.						
	Faktor Pendorong : 1. Ketersediaan anggaran 2. Alat Kelengkapan Dewan aktif dalam proses pengusulan Raperda inisiatif 3. Alat Kelengkapan Dewan menggunakan fasilitas kelompok pakar yang sudah disediakan. 4. Jadwal Banmusy.						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2015 : Meningkatkan berkomunikasi dengan Alat Kelengkapan DPRD						
1.2	<i>Terfasilitasinya peningkatan wawasan DPRD DIY</i>						
1.2.1	Jumlah keikutsertaan Anggota DPRD dalam peningkatan kemampuan dan wawasan	362	220	143	65	220	65.00
	Faktor Penghambat : 1.Adanya Surat Edaran Mendagri No : 900/6975/SJ tanggal 28 November 2014 tentang penghematan orientasi dan pendalaman tugas. 2. Tidak semua anggota dewan mengikuti bimtek						
	Faktor Pendorong : 1. Ketersediaan anggaran 2. Dewan aktif dalam mengikuti kegiatan bimtek.						






No	Tujuan / Sasaran / Indikator	Capaian/Kondisi 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap 2017 (AKHIR RPJMD)(%)
			Targ et	Realisa si	% Realisas i		
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2015 : Meningkatkan komunikasi dengan pimpinan DPRD						
1.3	<i>Koordinasi, komunikasi, delegasi, konsultasi serta kunjungan kerja DPRD dalam rangka menghimpun bahan kebijakan DPRD DIY</i>						
1.3.1	Jumlah rekomendasi kiner sebagai bahan kebijakan DPRD	167	246	117	47.56	218	53.67
	Faktor Penghambat : Padatnya kegiatan dewan, kegiatan dilaksanakan menyesuaikan agenda dewan, Alat Kelengkapan Dewan periode 2014-2019 baru terbentuk pada tanggal 17 Desember 2014, adanya masa transisi anggota periode 2009-2014 dengan anggota periode 2014-2019,						
	Faktor Pendorong : Ketersediaan anggaran, Kesiapan dewan melaksanakan kegiatan kunjungan sesuai rencana						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2015 : Meningkatkan komunikasi dengan Alat Kelengkapan Dewan						
2	Mewujudkan bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian, layanan informasi DPRD dalam mendorong terwujudnya Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD, serta meningkatkan fungsi kepastakaan						
2.1	<i>Meningkatnya kualitas bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian, layanan informasi DPRD dalam meningkatkan kinerja DPRD</i>						
2.1.1	Prosentase kajian/makalah/research Brief yang dimanfaatkan oleh DPRD untuk melaksanakan fungsi DPRD	100	100	103,16	103.16	100	103.16

No	Tujuan / Sasaran / Indikator	Capaian/Kondisi 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap 2017 (AKHIR RPJMD)(%)
			Targ et	Realisa si	% Realisas i		
	Faktor Penghambat : -						
	Faktor Pendorong : Ketersediaan anggaran						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2015 :						
3	Mewujudkan kualitas dokumen kegiatan DPRD, kualitas persidangan dan kualitas risalah hasil rapat-rapat DPRD						
3.1	<i>Meningkatnya kualitas dokumen kegiatan DPRD, kualitas persidangan dan kualitas risalah hasil rapat-rapat DPRD</i>						
3.1.1	Prosentase kegiatan dan kebijakan DPRD yang terdokumentasikan	91,65	100	105,81	105.81	100	105.81
	Faktor Penghambat : -						
	Faktor Pendorong : Ketersediaan anggaran , Meningkatkan koordinasi dengan alat kelengkapan dewan						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2015 :						
4	Mewujudkan jejaring kerja antara, DPRD, Partai Politik, Stakeholder, Pemerintah Daerah dan Masyarakat						
4.1	<i>Terfasilitasinya hearing/dialog dan koordinasi dengan semua stakeholder kegiatan Reses dan terjalinnya kemitraan dengan media massa serta publikasi kegiatan DPRD</i>						
4.1.1	Jumlah aspirasi dari masyarakat yang diterima	141	212	136	64.15	186	73.12
	Faktor Penghambat : Kegiatan sifatnya fasilitasi tergantung dari jumlah tamu dan unjukrasa yang datang						

No	Tujuan / Sasaran / Indikator	Capaian/Kondisi 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap 2017 (AKHIR RPJMD)(%)
			Targ et	Realisa si	% Realisas i		
	Faktor Pendorong : Ketersediaan anggaran, Kesiapan Pimpinan yang menerima tamu ataupun unjukrasa						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2015 : Meningkatkan sosialisasi dan kerjasama dengan stakeholder sehingga ada lebih banyak aspirasi masyarakat yang dapat disampaikan secara langsung kepada DPRD.						
4.1.2	Frekuensi Sosialisasi kegiatan DPRD kepada masyarakat yang terlaksana	59	72	72	100	57	126.32
	Faktor Penghambat : -						
	Faktor Pendorong : Ketersediaan anggaran , Kesiapan Alat kelengkapan dewan dalam mempublikasikan informasi di media , menggunakan media elektronik						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2015 : Meningkatkan sosialisasi dengan pihak terkait.						
5	Mewujudkan adanya Tenaga Ahli Fraksi, kelompok pakar serta narasumber yang dibutuhkan dalam mendukung kinerja dan hasil kerja DPRD						
5.1	<i>Tersedianya tenaga ahli/narasumber/kelompok pakar dan bahan raperda inisiatif serta kajian kebijakan untuk pembahasan Program Legislasi Daerah</i>						
5.1.1	Prosentase rekomendasi / masukan tenaga ahli/pakar DPRD	63,04	100	87,62	87.62	100	87.62

No	Tujuan / Sasaran / Indikator	Capaian/Kondisi 2013	2014			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap 2017 (AKHIR RPJMD)(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
	Faktor Penghambat : Tidak semua ALat Kelengkapan Dewan menggunakan kelompok pakar (kelompok pakar digunakan menyesuaikan kebutuhan)						
	Faktor Pendorong : Ketersediaan anggaran, Ketersediaan Kelompok Pakar.						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2015 : Meningkatkan komunikasi dengan Alat Kelengkapan dewan dan Meningkatkan jejaring kerja dengan Perguruan Tinggi, Institusi Pemerintah dan memaksimalkan SDM dan Sarana Prasarana penunjang fasilitas yang ada.						

Keterangan Warna

Warna	Prosentase	Keterangan
	0 s/d 50	Sangat Rendah
	50.1 s/d 65	Rendah
	65.1 s/d 75	Sedang
	75.1 s/d 90	Tinggi
	90.1 lebih	Sangat Tinggi

(sumber : Permendagri 54 / 2010)

III.3. Akuntabilitas Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2014 sebesar 72,87% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 68,54%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 4,33%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Koordinasi dan komunikasi, delegasi dan konsultasi serta kunjungan kerja DPRD dalam rangka menghimpun bahan kebijakan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (41,80%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran meningkatnya kualitas bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian, layanan informasi DPRD dalam meningkatkan kinerja DPRD (1,42%).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2014 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2014 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2014

No	Sasaran	Kienerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Terfasilitasinya penyusunan Raperda Inisiatif dan Pembahasan Perda oleh DPRD	93 %	88,9	99,59	9.703.278.000	6.728.774.294	69,35
2.	Terfasilitasinya Peningkatan wawasan, DPRD	212 kali	136	64,15	3.182.905.000	1.585.864.930	49,82

No	Sasaran	Kienerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
3.	Koordinasi dan komunikasi, delegasi dan konsultasi serta keterlibatan DPRD dalam menghimpun bahan kebijakan DPRD DIY	246 kali	117	47,56	14.681.122.702	9.518.639.832	64,84
4.	Meningkatnya kualitas bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian, layanan informasi DPRD	100 %	103,16	103,16	340.740.700	324.286.050	95,17
5.	Meningkatnya kualitas dokumen kegiatan, persidangan dan risalah hasil rapat-rapat DPRD	100 %	105,81	105,81	1.260.334.500	848.059.520	67,29
6.	Terfasilitasinya hearing/dialog dan koordinasi dengan semua	284 kali	208	72,24	4.211.997.500	3.381.568.790	80,28

No	Sasaran	Kienerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
	stakeholder kegiatan Reses dan terjalannya kemitraan dengan media massa serta publikasi kegiatan DPRD						
7.	Tersedianya tenaga ahli/narasumber/ kelompok pakar dan bahan raperda Inisiatif serta kajian kebijakan untuk pembahasan Program Legislasi Daerah	100 %	87,62	87,62	463.350.000	386.075.750	83,32
Jumlah					33.843.728.402	22.773.269.166	
Belanja Langsung Pendukung					11.750.855.201	10.450.878.860	
Total Belanja Langsung					45.594.583.603	33.224.148.026	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ini disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2014, serta Penetapan Kinerja Tahun 2014 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagaijabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 7 sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 8 indikator.

Penyelenggaraan kegiatan di Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2014 merupakan tahun ke 3 dari Rencana strategis Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana.
2. Dari analisis 7 sasaran, terdapat 1 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2014, 4 indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 50 % dari total indikator. Sementara itu, sebanyak 4 indikator atau sebesar 50 % belum memenuhi target. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2014 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.